



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara multikultural yang memiliki ragam suku, ras, agama, dan etnis. Keanekaragaman tersebut membuat Indonesia menjadi negara yang kaya akan budaya dan bahasa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk 2010 menyebutkan terdapat 1.331 kelompok suku di Indonesia yang tersebar lebih dari 17 ribu pulau. Angka ini berpengaruh pada interaksi antar individu atau kelompok masyarakat (Badan Pusat Statistik, 2019).

Dalam berinteraksi, erat kaitannya dengan komunikasi lintas bahasa. Berdasarkan data Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat 652 bahasa daerah di Indonesia (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019). Hal ini berarti komunikasi yang baik sangat diperlukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berujung pada konflik.

Konflik berpotensi terjadi, jika kemajemukan yang ada tidak dibina dengan baik oleh masyarakat. Konflik tersebut dapat memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Konflik merupakan masalah sosial yang dialami oleh semua negara. Konflik yang terjadi dalam suatu negara dapat mengarah pada disintegrasi dan berpotensi menjadi masalah yang berkepanjangan bagi kalangan

elit, kalangan cendekiawan, dan kalangan awam (Herman & Nurdiansa, 2010, p. 154).

Konflik juga dapat diartikan sebagai pertarungan antara dua pihak atau lebih, bisa individu maupun kelompok yang biasanya disebabkan oleh perbedaan nilai, pandangan, aktivitas, status, dan kelangkaan sumber daya alam (Marina & Dharmawan, 2011, p. 91). Menurut Suparlan, terdapat beberapa indikator yang menjadi penyebab konflik di Indonesia, di antaranya (Suparlan, 2003):

1. Corak Bhineka Tunggal Ika sebagai lambang negara yang menekankan komposisinya pada keanekaragaman sukubangsa dan kesukubangsaan, dan bukannya pada kebudayaan sebagai fokus keanekaragamannya dan keanekaragaman suku bangsa sebagai produk dari keanekaragaman kebudayaan tersebut.
2. Sistem nasional yang otoriter-militeristis dan korup dalam segala aspeknya sehingga terjadi berbagai bentuk manipulasi hukum dan SARA bagi berbagai kepentingan dan keuntungan oknum yang menyebabkan munculnya rasa ketidakadilan hanya dapat diatasi dalam perlindungan suku bangsa dan kesukubangsaan.
3. Corak masyarakatnya yang tidak demokratis walau diakui sebagai demokratis. Dalam pemerintahan Soeharto, konsep demokrasi diberi embel-embel seperti demokrasi Pancasila yang hanya menjadi angan-angan karena tidak operasional. Oleh karena itu, demokrasi tidak menjadi ideologi dalam pengertian yang sebenarnya karena hanya *lip-service* saja.

Keterbukaan akan informasi antar budaya menjadi penting untuk meminimalkan terjadinya konflik. Kehadiran media massa, seperti televisi, radio, dan surat kabar membuat masyarakat dari berbagai latar belakang budaya dapat memahami kebudayaan lainnya. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Bend Abidin Santosa pada 2017, bahwa media massa mempunyai peran yang signifikan dalam membentuk opini publik dan mengonstruksi realitas di masyarakat dalam menyampaikan berbagai informasi serta nilai-nilai agar tercipta sikap toleransi sehingga tidak timbul konflik (Santosa, 2017, p. 208). Begitupun dengan berbagai peristiwa yang diangkat dalam pemberitaan media.

Sebuah peristiwa layak diangkat dalam pemberitaan media jika memiliki nilai berita. McQuail membagi tujuh nilai berita, yaitu: (1) *Timeless*, (2) *Impact*, (3) *Prominence*, (4) *Proximity*, (5) *Conflict*, (6) *The unusual*, (7) *The currency* (McQuail D. , 1987). Sebagai salah satu nilai berita, konflik tidak luput dari pemberitaan media di dalam maupun luar negeri. Wakos Reza Gautama mengatakan nilai berita pada konflik membuat ada media yang memberitakannya dengan bumbu sensasional dan ada yang memberitakan apa adanya (Setyawan, et al., 2012, p. 7). Beberapa praktisi juga melihat media massa bukan media yang memulai konflik, tetapi pada faktanya media massa bisa menyuburkan konflik dan kekerasan lanjutan melalui pemberitaan yang tidak mempertimbangkan dampak dari konflik itu sendiri (Budiman & Saroso, 2012, p. 166). Terkadang dengan gaya penyajiannya yang hiperbolis, media bisa memprovokasi pihak yang bertikai untuk segera memulai peperangan (Syam, 2015, p. 188).

Di samping itu, mengabarkan fakta adalah salah satu ciri objektivitas dalam kerja jurnalisme. Dalam sebuah pemberitaan, objektivitas sangatlah penting. Berita dapat dikatakan objektif apabila telah memenuhi beberapa unsur, di antaranya tidak memihak sama sekali, pemberitaan bersifat transparan, sumber berita yang didapat harus jelas, serta tidak terdapat tujuan atau misi tertentu di dalam pemberitaan tersebut (Sumadiria, 2005).

Namun, seringkali fakta yang diungkap secara apa adanya bisa menimbulkan konflik semakin besar dan berkepanjangan. Pemberitaan media yang berisi konflik dapat berpengaruh pada perluasan eskalasi konflik atau sebaliknya dapat membantu meredakan dan menyelesaikan konflik (Siebert & Schramm, 1986). Dalam hal ini media kerap dituduh sebagai *conflict intensifier* (memperuncing konflik). Di sisi lain media dihadapkan pada tuntutan berbagai pihak untuk menyelesaikan konflik (*conflict diminisher*). Maka dari itu, untuk memenuhi harapan tersebut mengandung resiko bahwa media harus menyeleksi bahkan menutupi fakta-fakta yang dianggap sensitif bagi kelompok-kelompok tertentu (Syam, 2015, p. 188).

Salah satu konflik yang ramai diperbincangkan media adalah peristiwa Papua. Peristiwa ini bermula dari bentrokan yang terjadi antara sekelompok warga Malang dengan mahasiswa Papua di kawasan Rajabali, Malang, Jawa Timur pada 15 Agustus 2019. Berdasarkan laporan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Malang, mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) melakukan aksi damai di Balai Kota Malang. Aksi damai tersebut

bertujuan untuk menolak penandatanganan *New York Agreement* antar pemerintah Indonesia dan Belanda yang terjadi pada 15 Agustus 1962. Aksi Damai rutin dilakukan setiap 2 hari menjelang HUT Kemerdekaan RI tiap tahunnya (CNN Indonesia, 2019).

Pukul 08.55 WIB, AMP tiba di Simpang Empat Rajabali dan bertemu sekelompok warga Malang. Kemudian, terjadi perselisihan dan adu mulut. Puncak dari perselisihan tersebut, terjadi bentrokan dengan saling melempar batu. Aksi ini berujung pada tindakan rasisme di Surabaya. Sekitar 15 anggota TNI mendatangi asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Kedatangan anggota TNI ditenggarai oleh bendera Merah Putih milik pemerintah Kota Surabaya yang berada di depan asrama, tiba-tiba sudah berada di saluran air. Terjadilah negosiasi di antara mahasiswa asrama Papua dengan anggota TNI. Mahasiswa Papua mengaku tidak melakukan pelecehan terhadap bendera Merah Putih tersebut. Setelah kedatangan anggota TNI, tidak lama kemudian datang Satpol PP dan organisasi masyarakat ikut mengepung asrama Papua. Pada waktu itu pula mahasiswa Papua mendapatkan pernyataan negatif yang akhirnya menimbulkan kericuhan di Manokwari (Tirto.id, 2019).

Pada 19 Agustus 2019, mahasiswa dan masyarakat di Manokwari melayangkan protes karena tidak terima dengan rasisme dan persekusi terhadap mahasiswa Papua di Jawa Timur. Massa juga sempat membakar Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan merusak sejumlah fasilitas umum. Aksi tersebut memicu massa di Jayapura dan Sorong. Hingga 21 Agustus 2019, kondisi

di Papua belum juga kondusif. Massa di Fakfak juga melakukan aksi dengan merusak dan membakar fasilitas umum. Aksi juga terjadi di Timika, massa melempari Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mimika (DPRD Mimika) dengan batu (Tirto.id, 2019).

Sementara itu, pejabat negara mulai bergiliran memberikan tanggapan akan peristiwa ini. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut kerusuhan yang terjadi di Papua dipicu oleh kesalahpahaman, sedangkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto menyebut bahwa kerusuhan dipicu oleh pernyataan negatif sejumlah pihak, termasuk aparat dan masyarakat. Keterangan lain juga disampaikan oleh Karopenmas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo yang menyebut peristiwa Papua Barat dipicu oleh provokasi konten di media sosial (Tirto.id, 2019).

Pada akhir Agustus, Polda Papua akhirnya menetapkan beberapa tersangka dari konflik ini. Usai konflik terjadi, pemerintah juga turut serta melakukan upaya untuk memulihkan kembali keamanan di Papua. Sayangnya, kedamaian Papua tidak berlangsung lama. Pada 23 September 2019, konflik kembali terjadi di Wamena dan Jayapura, lalu mereda pada akhir bulan September 2019 (Kompas.com, 2020).

Konflik Papua banyak diangkat oleh media nasional maupun internasional. Di Indonesia, isu Papua merupakan hal yang sensitif. Sejarah mencatat pada 27 Desember 1949, Konferensi Meja Bundar (KMB) menghasilkan penyerahan kedaulatan Papua dari Belanda kepada Indonesia. Namun, hasil dari KMB masih

belum sepenuhnya tuntas dan malah menimbulkan persoalan. Indonesia dan Belanda saling memaksakan hak atas tanah Papua Barat. Bagi Belanda, *Netherlands New Guinea* (Papua Barat) bukan bagian dari negara kesatuan yang harus dikembalikan kepada Belanda. Hal ini dikarenakan orang asli Papua memiliki perbedaan ciri fisik dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Dengan alasan ini, Belanda berkeinginan menjadikan Papua Barat sebagai sebuah negara di bawah naungan Kerajaan Belanda (Tirto.id, 2019).

Di samping itu, Indonesia tidak sepakat dengan alasan yang diberikan Belanda. Indonesia menghendaki seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda harus diserahkan kembali (Tirto.id, 2019). Dikutip dari Sejarah Nasional Indonesia Jilid V (2008) karya Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Indonesia telah mengusahakan penyelesaian masalah Irian Barat selama 11 tahun. Namun, karena Belanda tidak mengindahkan, persoalan ini dibawa ke forum PBB pada 1954, 1955, 1957, dan 1960. Dalam sidang umum PBB tahun 1961, PBB menolak usulan dari Menteri Luar Negeri Belanda, Joseph Marie Antoine Hubert Luns mengenai Papua Barat di bawah perwalian PBB sementara (Poesponegoro & Notosusanto, 2008).

Sementara itu, Nugroho Notosusanto dalam Sedjarah Operasi-operasi Pembebasan Irian Barat (1971) menyebutkan bahwa pada 2 Januari 1962, melalui Keputusan Presiden Nomor 1/1962, Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala untuk merebut Papua dengan dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto. Hasil dari pembentukan operasi militer ini, 15 Agustus 1962 terjadi kesepakatan

perjanjian New York. Isi perjanjian ini adalah Belanda akan menyerahkan kekuasaannya atas Papua kepada *United Nations Temporary Executive Authority* (UNTEA). Perjanjian New York juga memberikan kesempatan bagi rakyat Papua untuk memutuskan sendiri akan menjadi bagian dari Indonesia atau tidak (Pepera - Penentuan Pendapat Rakyat). Pada 1 Oktober 1962, keputusan dari Pepera membuat Belanda menyerahkan otoritas administrasi Papua kepada UNTEA sehingga akhir bulan Desember 1962, bendera Belanda resmi diturunkan dan digantikan dengan bendera Merah Putih sebagai tanda dimulainya kekuasaan de jure Indonesia atas tanah Papua di bawah pengawasan PBB (Tirto.id, 2019).

Maraknya pemberitaan di media atas peristiwa Papua, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menghimbau kepada jurnalis dan media untuk menerapkan prinsip jurnalisme damai dalam pemberitaan peristiwa bernuansa konflik, seperti pada peristiwa Papua. Menurut AJI, jurnalisme damai tak berpretensi untuk menghilangkan fakta, tetapi yang lebih diutamakan adalah memilih atau menonjolkan fakta yang bisa mendorong turunnya tensi konflik dan ditemukannya penyelesaiannya secara segera (Aliansi Jurnalis Independen, 2019).

Mengutip pernyataan Johan Galtung dalam jurnal karya Oktarianisa, jurnalisme damai diartikan sebagai jurnalisme yang berdiri di atas nama kebenaran yang menolak propaganda dan kebohongan di mana kebenaran dilihat dari beragam sisi tidak hanya dari sisi “kita” (Oktarianisa, 2009, p. 543). Orientasi jurnalisme damai adalah kemanusiaan yang mana konflik tidak hanya diwartakan sebagai sebuah peristiwa atau perang, melainkan literasi non kekerasan yang

menjadi tanggung jawab jurnalis mengenai konsekuensi laporan mereka (Syam, 2015, p. 175).

Lynch dan McGoldrick dalam jurnal karya Oktarianisa menyebutkan tiga hal yang paling penting dalam jurnalisme damai, yaitu: *Pertama*, menggunakan wawasan yang lebih luas dalam memandang dan menganalisis sebuah konflik dan mentransformasikannya sebagai konsep yang seimbang, adil, dan akurat dalam melaporkan berita. *Kedua*, membuat cara baru dalam memetakan sebuah hubungan di antara jurnalis, sumber, cerita yang mereka buat dan konsekuensi dari bentuk jurnalisme yang dipakai di mana ada intervensi etika dalam jurnalisme. *Ketiga*, membangun kesadaran atas pentingnya fokus pada anti kekerasan yang diimplementasikan dengan kegiatan keseharian jurnalis baik reporter ataupun editor (Oktarianisa, 2009, p. 545).

Jurnalisme damai mulai banyak diperbincangkan di Indonesia ketika terjadi insiden kekerasan berbau SARA sejak 1998, mulai dari kekerasan rasial terhadap etnis Tionghoa pada 13-14 Mei 1998 di Jakarta, pembersihan etnis Madura di Sambas, Kalimantan Barat pada 1999, konflik Maluku 2000-2001, Darurat Militer di Aceh pada 2003-2005, dan konflik Muslim – Kristen di Poso sejak Desember 1998 (Syam, 2015, p. 177). Sayangnya pada waktu itu, jurnalisme damai hanya sebagai wacana. Padahal media sedang menjadi andalan tiap orang untuk memperoleh informasi, seperti saat kerusuhan Maluku tahun 1999. Adanya pemisahan kerja wartawan Muslim dan Kristen menjadi pemicu semakin terpecahnya masyarakat antar golongan di Maluku. Akibatnya, konflik semakin

memanas. Wartawan Muslim dalam Ambon Express dan wartawan Kristen pada Suara Maluku masing-masing saling menyudutkan lawan (Syam, 2015, p. 177).

Mereka pun mengeksploitasi sebuah peristiwa secara berpihak, vulgar, dan hanya mengandalkan beberapa narasumber yang diragukan kredibilitasnya. Mulai dari situlah jurnalisme damai mulai dirasa penting untuk digunakan dalam kegiatan jurnalistik. Tujuannya agar media yang sifatnya umum tidak dijadikan alat propaganda dan pemberitaan yang disajikan pun bersifat lebih manusiawi (Syam, 2015, p. 178).

Munculnya jurnalisme damai juga menjadi salah satu alternatif di tengah banyak pihak yang lebih suka menggunakan paradigma jurnalisme perang atau seringkali berlindung di balik tameng objektivitas berita (Budiman & Saroso, 2012, p. 166). Jurnalisme perang sendiri cenderung mengekspos dan menekankan semangat untuk bertikai di antara pihak yang berkonflik. Jurnalisme perang membiarkan aroma dendam dan kebencian menghiasi pemberitaan konflik (Syam, 2015, p. 186).

Henny puspawati pada 2004 pernah mengkaji *framing* jurnalisme damai dan jurnalisme perang di media (Syam, 2015, p. 188). Dalam penelitian tersebut, Henny menggunakan pendekatan kritis dengan melihat bagaimana praktik pembingkai jurnalisme damai dan jurnalisme perang dalam berita mengenai konflik Aceh antara TNI dan GAM di Harian Kompas dan Republika selama pemberlakuan Darurat Militer pertama di Aceh.

Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa penonjolan dan penggambaran berita cenderung lebih berpihak pada TNI daripada GAM selama periode 18 Mei sampai 16 November 2003. Kedua media tersebut justru lebih menonjolkan ke aspek-aspek berita yang bernilai jurnalisme perang ketimbang jurnalisme damai (Syam, 2015, p. 189). Padahal, dengan diterapkannya jurnalisme damai dalam peliputan konflik dapat mempertegas kembali kekuatan media melalui proses pemingkanaan, teknik pengemasan fakta, pemilihan sudut pandang, penambahan atau pengurangan gambar yang berpeluang jadi peredam konflik (Syam, 2015, p. 188), begitupun dengan penerapannya pada pemberitaan konflik Papua Barat.

Dari beberapa media televisi di dalam negeri, stasiun televisi berita menayangkan konflik Papua Barat secara lebih *intens*. Ross Tapsell dalam bukunya *Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution* mengatakan Metro TV yang dahulu menjadi satu-satunya stasiun televisi dengan siaran beritanya 24 *non-stop* memasuki babak era digital yang penuh dengan persaingan. Hal ini dilihat dari perluasan bisnis yang dilakukan oleh beberapa kerajaan media lain, seperti Kompas TV, iNews, TV One, dan Berita Satu yang juga turut serta menjadi stasiun televisi berita.

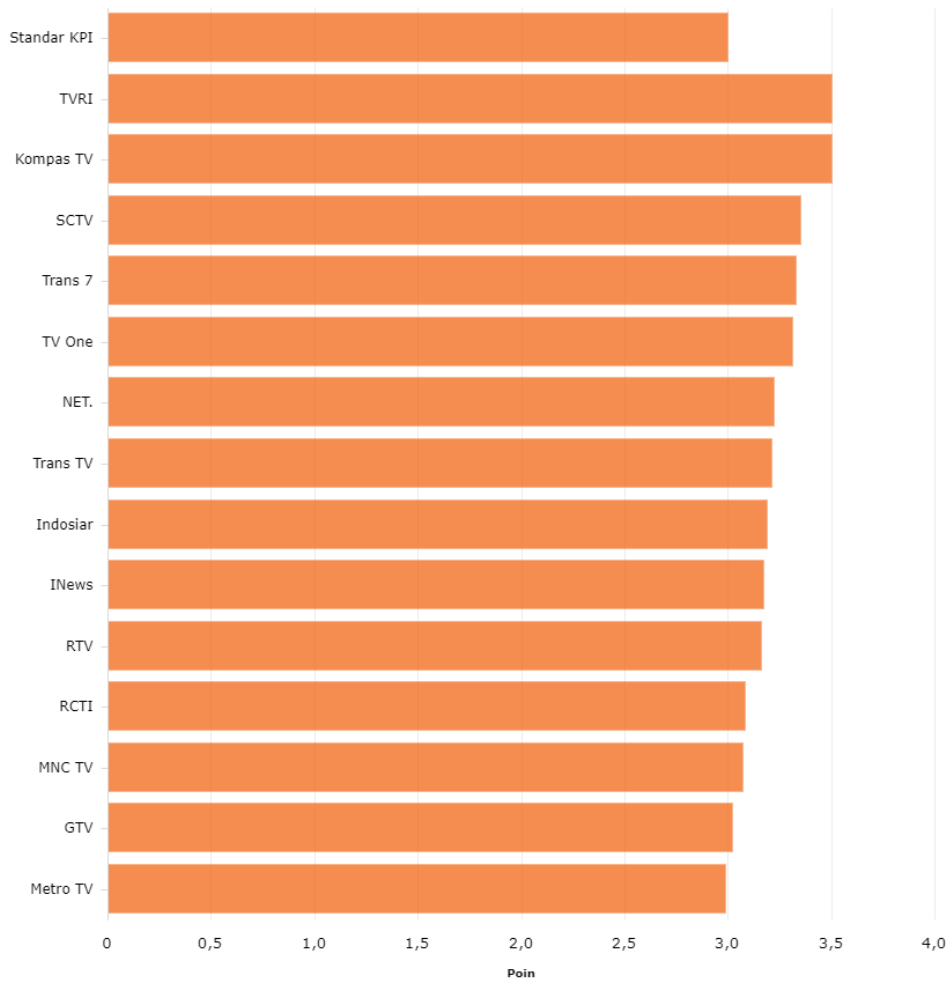
Sementara itu, berdasarkan indeks kualitas program berita periode II tahun 2019 yang telah dirilis oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Kompas TV menjadi stasiun televisi berita yang berada di posisi pertama dengan indeks sebesar 3,5. Kemudian, diikuti oleh TV One dengan angka 3,31 poin dan iNews dengan

angka 3,17. Ketiga media televisi berita tersebut telah melampaui standar kualitas KPI dengan angka 3.

Gambar 1.1

Indeks Kualitas Program Berita

Indeks Kualitas Program Berita Periode II (2019)



katadata.co.id

databoks

(Sumber: *Katadata.co.id*, 2019)

Mengacu pada hasil riset tersebut, peneliti tertarik untuk melihat seberapa tinggi tingkat penerapan jurnalisme damai dalam memberitakan konflik Papua Barat di Kompas TV, TV One, dan iNews. Objek penelitian yang digunakan penulis adalah program berita Kompas Pagi dan Kompas Petang (Kompas TV), Kabar Pagi, Kabar Utama, dan Kabar Petang (TV One) serta iNews Pagi dan iNews Sore (iNews).

Program berita tersebut dipilih oleh penulis karena tayang pada waktu *prime time*. *Prime time* adalah waktu utama di mana jumlah penonton paling banyak. *Prime time* berada pada pagi hari pukul 04.00 sampai dengan 09.00, waktu ketika orang bersiap melakukan aktivitas (Abdullah, Rosfiantika, & Permana, 2017, p. 167) dan malam hari pukul 18.00 sampai dengan 22.00, waktu ketika sudah tiba di rumah setelah menjalani aktivitas (Panjaitan & Iqbal, 2006, p. 42).

Walaupun penerapan konsep jurnalisme damai pada media telah banyak diteliti, peneliti belum menemukan riset yang berfokus pada tayangan. Kebanyakan penelitian terdahulu hanya mengkaji media berbentuk tulisan, seperti penelitian Ryan Juliansyah pada 2016 dengan judul “Jurnalisme Damai Sebagai Upaya Menjaga Perdamaian yang Berkelanjutan” yang menganalisis surat kabar lokal Harian Serambi Indonesia (Juliansyah, 2016), penelitian Bend Abidin dengan judul “Peran Media Massa dalam Mencegah Konflik” yang menganalisis tujuh media *online* di Indonesia (Santosa, 2017), dan penelitian Audi Bernadus dengan judul “Analisis Penerapan Jurnalisme Damai di Media Daring *tirto.id* dalam Pemberitaan Konflik Etnis Rohingya dan Militer Myanmar” yang

menganalisis media *online* Tirto.id (Bernadus, 2018). Padahal, sebuah tayangan tidak hanya menampilkan tulisan saja. Lebih dari itu, terdapat gambar dan suara.

Tayangan berita televisi memiliki pengaruh yang besar. Sebagai salah satu media massa, televisi masih menjadi media utama bagi masyarakat untuk mengakses informasi. Hal ini dibuktikan dari survei Nielsen *Consumer Media View* (CMV) pada 2017 yang menunjukkan bahwa penetrasi televisi mencapai 96 persen dibandingkan dengan radio dan surat kabar (Katadata, 2019). Selain itu, terdapat pula peringatan Hari Televisi Sedunia oleh PBB pada 1996. Peringatan tersebut sebagai bentuk pengakuan akan dampak yang semakin besar dari televisi terhadap tontonan yang membawa berbagai konflik dan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan. Termasuk didalamnya isu ekonomi dan sosial (Kompas.com , 2019).

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengisi celah pada penelitian-penelitian sebelumnya yang hanya fokus melihat tingkat penerapan konsep jurnalisme damai di Barat. Peneliti hanya menemukan satu penelitian (Bui, 2012) yang menganalisis tingkat penerapan jurnalisme damai di media dengan cakupan Asia. Hanya saja penelitian tersebut dilakukan di Vietnam dan belum ada yang melakukan penelitian serupa dengan konteks Indonesia.

Selain menguji tingkat penerapan aspek-aspek jurnalisme damai dalam tayangan berita, penelitian ini dilakukan untuk menambah sudut pandang baru terhadap konsep jurnalisme damai. Meskipun tiap media memiliki dasar objektivitas dalam membuat materi berita. Namun, objektivitas tidak selalu baik

dan perlu dikesampingkan jika akan memperpanjang atau menambah konflik yang sedang terjadi. Maka dari itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk mengkaji kembali dasar etika jurnalistik. Hal ini bertujuan agar media mampu menjadi penengah dari pertikaian yang ada.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan di atas, media yang seharusnya dapat memberikan informasi yang menenangkan, dapat berperan sebaliknya, sehingga menarik untuk mengkaji apakah berita yang diproduksi oleh beberapa media sudah menerapkan aspek-aspek dalam jurnalisme damai.

Hal tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk merumuskan masalah penelitian di mana didapatkan sebuah rumusan masalah, yaitu:

Seberapa tinggi Kompas TV, TV One, dan iNews menerapkan konsep jurnalisme damai dalam tayangan berita konflik Papua Barat periode Agustus – September 2019?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, maka terdapat beberapa pertanyaan pendukung yang akan diajukan oleh peneliti. Pertanyaan penelitian tersebut antara lain:

1. Aspek/indikator dan dimensi apa yang menonjol dalam konsep jurnalisme damai di Kompas TV, TV One, dan iNews?

2. Seberapa tinggi tingkat penerapan aspek-aspek/indikator dalam jurnalisme damai pada Kompas TV, TV One, dan iNews?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aspek/indikator dan dimensi apa yang menonjol dalam konsep jurnalisme damai di ketiga media.
2. Untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat penerapan aspek-aspek/indikator dalam jurnalisme damai pada ketiga media.

1.5 Kegunaan Penelitian

Berikut ini adalah tiga kegunaan dari penelitian yang telah dibuat, yaitu:

1.5.1 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk melihat penerapan aspek-aspek jurnalisme damai dalam pemberitaan konflik. Selain itu, hasil penelitian dapat berguna untuk memperjelas dimensi kedua dari konsep jurnalisme damai, yaitu orientasi pada kebenaran yang pada penelitian-penelitian terdahulu belum memiliki indikator terperinci.

Dalam upaya untuk memahami bagaimana media menerapkan aspek-aspek jurnalisme damai, peneliti menggunakan sistem *skoring*

agar bisa lebih menggambarkan seberapa besar tingkat penerapan pada media. Hal ini berbeda dengan cara menganalisis pada penelitian kuantitatif sebelumnya di mana menggunakan kategorisasi yang hanya sekedar mengkategorikan saja, namun tidak bisa melihat tingkat besarnya. Sehingga, peneliti juga berharap hasil dari penelitian ini dapat meningkatkan minat para akademisi untuk melanjutkan penelitian dengan metode analisis isi dan penghitungan *skoring*.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Bagi jurnalis Kompas TV, TV One, dan iNews, penelitian ini berguna untuk mengetahui tingkat penerapan jurnalisme damai dalam memberitakan konflik Papua Barat. Selain itu, jurnalis Kompas TV, TV One, dan iNews diharapkan mampu mempertahankan hal-hal yang baik dan selalu menerapkan jurnalisme damai pada berita-berita konflik yang dibuat.

Bagi media lain, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran sejauh mana jurnalisme damai diterapkan pada media dalam negeri. Hal ini bertujuan agar para jurnalis dapat menimbang dan mengolah informasi terlebih dahulu sebelum memberitakannya.

Hasil dari penelitian ini juga berguna untuk dapat mengetahui aspek jurnalisme damai yang sudah diterapkan dengan baik dan aspek jurnalisme damai yang masih kurang penerapannya.

1.5.3 Kegunaan Sosial

Bagi masyarakat, penelitian ini berguna untuk dapat memberikan gambaran kondisi pemberitaan konflik pada media di dalam negeri, khususnya Kompas TV, TV One, dan iNews. Selain itu, masyarakat diharapkan mampu menyikapi dengan bijak berita-berita konflik di media.

1.6 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini terbatas pada daftar tayangan berita konflik Papua Barat dari ketiga media tersebut didapat penulis melalui akun *Youtube* Kompas TV, TV One, dan iNews. Hal ini memungkinkan ada beberapa tayangan yang tidak masuk ke dalam populasi.